



INDIKATOR KINERJA UTAMA (iku)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon/Faksimile (0511) 799180

MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
NOMOR 523.1.1/ 041 /DKPP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 - 2022
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan No. NOMOR 531.1/ /DKPP/2018 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

4. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.

5. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2017 -2022 dan Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017 - 2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal **03 Februari 2020**

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

**DR. Ir. RAHMANUDDIN, MS
PEMBINA TK. I**

NIP. 19650508 199803 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor 531.1/ /DKPP/2020
Tanggal, 3 Februari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas

: Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Ketahanan Pangan dan Perikanan
 4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Makna indikator : Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro) adalah pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan. PPH ketersediaan pangan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi (FAO-RAPA,1989). tujuan penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan (bagi kualitas hidup penduduk). Untuk kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/aneekaragam pangan)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Laporan Analisis Ketersediaan Pangan

			Alasan pemilihan indikator : PPH ketersediaan sendiri disusun untuk menyeimbangkan antara keberagaman pangan yang tersedia untuk kemudian di konsumsi oleh masyarakat. Dalam penyusunannya, Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan selalu menyertai Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran. Kondisi inilah yang mendasari dibutuhkan hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan. Cara penghitungan indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan diperoleh dari analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
2	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Makna indikator : PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa Alasan pemilihan indikator : Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Cara penghitungan indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi diperoleh dari analisa pola konsumsi pangan berdasarkan hasil survey konsumsi pangan rumah tangga	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan

3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Makna Indikator : Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit Alasan pemilihan indikator : Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut World Resources Institute tahun 1998 memiliki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Meningkatnya produksi perikanan dapat meningkatkan jumlah konsumsi ikan dalam negeri dan merupakan bagian penting untuk ketahanan pangan, terutama sebagai sumber protein bagi masyarakat. Cara penghitungan indikator : Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan dari total produksi perikanan budidaya ditambahkan dengan total produksi perikanan tangkap. Penghitungan dilakukan melalui sistem aplikasi Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Perikanan
---	---------------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------------

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala

Dr. Ir. RAHMANUDDIN, MS
NIP. 19650508 199803 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Tugas : Membantu dinas dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan

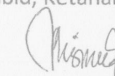
Fungsi : Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang Mandiri	Makna Indikator : Lumbung pangan masyarakat yang mempunyai kapasitas/kemampuan dalam penyediaan pangan dan mengantisipasi kerawanan pangan. Alasan Pemilihan Indikator : Adanya lumbung pangan masyarakat akan menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Lumbung Pangan dengan stock lebih dari 3 ton}}{\text{Jumlah target Lumbung Pangan}} \times 100 \%$	Bidang Ketahanan Pangan	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2	Meningkatkan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koefisien variasi harga beras ditingkat konsumen	Makna Indikator : Hasil Analisis data variasi harga beras ditingkat konsumen Alasan Pemilihan Indikator : Menjaga stabilitas harga pangan beras ditingkat konsumen Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Standar Deviasi harga}}{\text{Harga rata -rata}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Pangan	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Cadangan Pangan Pemerintah	Makna Indikator : Cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah. Alasan Pemilihan Indikator : Pengembangan Cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan pangan daerah dalam rangka penanganan kerawanan pangan pada saat pasca bencana Perhitungan Indikator : Jumlah cadangan pangan yang ada di gudang cadangan pangan pemerintah	Bidang Ketahanan Pangan	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

3	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penurunan Konsumsi Beras	Makna Indikator : Penurunan Konsumsi Beras merupakan suatu upaya dalam mengurangi ketergantungan terhadap beras dan meningkatkan konsumsi terhadap sumber karbohidrat dari umbi-umbian Alasan Pemilihan Indikator : Mengembangkan Diversifikasi konsumsi pangan menuju Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Perhitungan Indikator : Penurunan konsumsi beras pertahun	Bidang Ketahanan Pangan	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Persentase Komoditas Pangan yang aman dikonsumsi	Makna Indikator : Komoditas pangan yang aman dikonsumsi merupakan pilihan utama masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) . Alasan Pemilihan Indikator : Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya komoditas pangan yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari cemaran kimia dan mikroba . Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah komoditas pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah komoditas pangan beredar yang diuji}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Pangan	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Marabahan, 23 Januari 2020

Kabid, Ketahanan Pangan



Misral Munadiah, SP

NIP. 19660904 199803 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya produksi budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	KepMen KP RI Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik KepMen KP RI Nomor Kep.14/MEN/2012 Tentang Pedoman umum pertumbuhan dan pengembangan pelaku utama perikanan Tugas Pokok Kegiatan berupa merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan supervisi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perikanan budidaya se Kabupaten Barito Kuala. Pembiayaan berasal dari APBD pada DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Kuala. Dengan anggaran sebesar : 1.Revitalisasi Perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar Rp. 1.175.094.000,- 2.Revitalisasi Perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar (dak) Rp. 1.125.940.250,- 3. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. Rp. 90.568.250,-	Total produksi perikanan budidaya.	Diskanlut	

Keterangan :Diisi sesuai dengan Renstra SKPD.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya


H. SYAIFUL ASGAR, S.Pi. M.I.Kom
NIP. 19670317 198803 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BAKITO KUALA

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelak

[illegible]

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

GUSTI EDY JATMIKA, S.P!
NIP.19740201 200003 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap
Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis koordinasi, pemberi bimbingan teknis, dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha perikanan tangkap.
Fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan koordinasi dan pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang bina usaha perikanan tangkap serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan tangkap yang dibina dan berkembang usahanya	Jumlah nelayan tangkap yang dibina sehingga usaha perikanan tangkapnya dapat berkembang. Pembinaan nelayan ini berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pemilihan indikator berdasarkan	Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap	Data jumlah nelayan yang ada di seksi bina usaha perikanan tangkap

		jumlah nelayan di Kabupaten Barito Kuala yang mengikuti sosialisasi pembinaan pengembangan usaha perikanan tangkap yang diharapkan dapat meningkatkan usahanya. Perhitungan indikator berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan pengembangan usaha perikanan tangkap.		
--	--	---	--	--

Marabahan, 3 Februari 2020

Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap

(SUSILASARRI, S.PI)
NIP.19740909 200501 2 012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jabatan : Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
Tugas : Membantu bidang pelaksanaan kegiatan teknis, pembinaan umum dan teknis , koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan
Fungsi : Melaksanakan kegiatan teknis, pembinaan umum dan teknis , koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pembiayaan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kelompok yang dibina pola konsumsi pangannya	Jumlah kelompok wanita KRPL merupakan pelaksana kegiatan Pemanfaatan Pekarangan yang mendapatkan pembinaan tentang konsumsi pangan sehingga diharapkan pola konsumsinya menjadi lebih baik karena tersedianya pangan di pekarangan mereka sendiri disamping pengetahuan tentang pangan mereka bertambah, sehingga dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang terukur dari skor PPH.	Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
			Dari Rumah tangga yang disurvei untuk kegiatan analisis konsumsi pangan akan diketahui pola konsumsi masyarakat, akan diperoleh Angka Konsumsi Energi (AKG) dan Angka Konsumsi Protein (AKP) per kapita perhari serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menjadi Indikator Kinerja Utama Peningkatan Diversifikasi Pangan.	Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kegiatan Analisis Pola Konsumsi Pangan
			Kelompok Masyarakat dalam hal ini TP PKK perlu dibina untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dengan menu2 B2SA dan meningkatkan konsumsi makan ikan.	Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
2	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditas pangan yang diuji keamanannya	Komoditas yang aman akan dapat diketahui dengan pengujian terhadap komoditas tersebut dengan parameter Uji Residu Pestida atau uji mikrobiota berdasarkan batas standar BMR SNI.	Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kegiatan Uji Laboratorium Keamanan Pangan Segar

Marabahan, 3 Februari 2020
Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan,

HJ. Tri Susilawati, SP
NIP. 19740125 199903 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

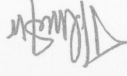
Jabatan : Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tugas : Membantu bidang pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis , koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketersediaan dan Distribusi pangan

Fungsi : Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis , koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan Distribusi pangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pengeolaan dan ketersediaan pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat dengan stock gabah di atas 3 (tiga) ton sebanyak 8 (delapan) lumbung per tahun	Jumlah kelompok lumbung pangan sebanyak 42 lumbung yang rata-rata stock nya 2-2,5 ton, target kegiatan 8 lumbung yang stock nya meningkat diatas 3 ton setiap tahun 2018-2021, kecuali tahun 2022 sebanyak 10 lumbung, pelaksanaan kegiatan pembinaan lumbung pertama perbaikan tata kelola lumbung pangan, tidak hanya bersifat sosial tetapi juga berorientasi bisnis	kasi ketersediaan dan distribusi pangan	Rekap laporan kelompok lumbung pangan
	Jumlah Dokumen Kondisi Ketahanan Pangan Daerah (Dokumen analisis ketersediaan pangan)	Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan pengolahan data produksi bahan makanan, pemasukan, pengeluaran dan perubahan-perubahan lain yang terjadi berkaitan dengan penduduk dan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan yang cukup, baik jumlah, mutu, keamanan, gizi dan keragaman serta terjangkau oleh daya beli masyarakat, sehingga dapat terpantau kerentanan dan kerawanan gizi melalui kegiatan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), yang mana dengan dokumen ini sebagai bahan rakor dengan instansi terkait. Memantau harga di 7 (Tujuh) pasar oleh petugas Enumerator terhadap 18 komoditas bahan pangan, dilaksanakan setiap minggu dan di rekap di kabupaten, untuk menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan pasokan pangan dan memantau harga gabah di 10 (sepuluh) produsen / pengilangan untuk menyediakan data/informasi berkaitan harga gabah/beras yang diindik lanjut dengan SERGAP (Serapan Gabah Petani)	kasi ketersediaan dan distribusi pangan	Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM), Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Laporan Harga Pangan	
	Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Pemenuhan untuk Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah total sebanyak 100 ton di tahun 2022, dengan program kegiatan bertahap setiap tahun 11 ton, 13 dan 16 ton, dilaksanakan pihak ketiga/kerjasama dengan BULOG . Beras di peruntukan nya untuk penganggulangan bencana / masalah rawan pangan di kabupaten. Untuk Tahun 2020 ini Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah sebanyak 10 ton.	kasi ketersediaan dan distribusi pangan	kegiatan pengembangan pangan pemerintah

Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan,



TETI ARIANTHI, S.PI

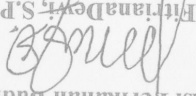
NIP. 19810602 200902 2 005

Jabatan	Tugas	Fungsi
: Kasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	: Membantu bidang menyiapkan nahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya.	: Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di seksi Sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya

NO	KINERJA UTAMA	Pengelolaan sarana dan prasarana perairan budidaya	1. sarana dan penerima sarana dan prasarana perairan budidaya	1. KepMen KP RI Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik. 2. KepMen KP RI Nomor Kep.14/MEN/2012 Tentang Pedoman umum pertumbuhan dan pengembangan pelaku utama perikanan 3. Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2019 4. Permenagri no 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD 5. Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Makna indikator : Berdasarkan Permen Kelautan Perikanan RI No. 70/Permen-KP/2016 tentang pedoman umum dalam penyusunan bantuan pemerintah di KKKP Ada 4 syarat yg harus dipenuhi oleh kelompok pembudidaya ikan untuk bisa mendapat bantuan sarpas budidaya, yaitu : 1. Memiliki kelompok yang disyahkan melalui akte pendirian kelompok oleh penyuluh perikanan setempat dan kepala desa setempat. Selanjutnya terdaftar di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala. 2. Usia Kelompok Pembudidaya Ikan minimal 2 tahun sejak Berita Acara pendirian kelompok 3. Berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham RI. 4. Mengajukan proposal bantuan yang ditunjukkan kepada Bupati Barito Kuala cq. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.	Setelah 4 syarat tersebut terpenuhi maka seksi Sarpas perikanan budidaya akan
PENJELASAN		(Makna Indikator, alasan pemilihan dan cara perhitungan indikator)				
SUMBER DATA	JAWAB	PENANGGUNG	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala			

		kelapangan untuk identifikasi lokasi dan kelayakan penerima bantuan sarpras perikanan budidaya Alasan pemilihan indikator : • Seksi sarpras dan produksi perikanan budidaya tugas utamanya pengadaan sarpras perikanan budidaya untuk membantu kelompok pembudidaya dalam usaha budidaya ikan yang tujuan akhir untuk peningkatan produksi perikanan budidaya • Cara perhitungan indikator : • dihitung dari jumlah kelompok penerima sarpras budidaya (yg telah lulus identifikasi kelayakan penerima budidaya) dalam tahun berjalan.		
--	--	--	--	--

Keterangan : Diisi sesuai dengan Renstra SKPD.

Marabahan, 21 Januari 2020
 Kepala Seksi Sarana Prasarana dan
 Produksi Perikanan Budidaya

 (Imelda Fitriana Dewi, S.Pi, MP)
 NIP. 19770903 260501 2 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya
Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang bina usaha perikanan budidaya
Fungsi :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)			
(1)	Pembinaan Usaha Perikanan Budidaya	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi budidaya ikan yang memahami Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	1. Jumlah Peserta Sosialisasi	Makna Indikator: Sosialisasi budidaya ikan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan kelompok pembudidaya ikan tentang pentingnya penerapan cara budidaya ikan yang baik dalam unit usaha budidaya ikan sehingga dapat mencapai hasil produksi yang maksimal Alasan Pemilihan :- masih banyak pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik Perhitungan Indikator :Jumlah peserta pelatihan per tahun	Makna Indikator :- temu usaha merupakan pertemuan antara pembudidaya ikan dengan pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan budidaya. Alasan pemilihan : Meningkatkan komunikasi dan hubungan usaha antara pelaku usaha perikanan budidaya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan usaha budidaya ikan	Perhitungan Indikator : Jumlah peserta temu usaha per tahun	

Marabahan, 3 Februari 2020
Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya

HJ. SITI AISYAH, S.Pi
NIP. 19680101 199703 2 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARTO KUALA**

Jabatan : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap
Tugas : Membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap.

No	KINERJA UTAMA				SUMBER DATA
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	(3)	(1)	
	KINERJA UTAMA	- Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	(2)	1. Pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA	- Jumlah kelompok penangkapan penerima sarana dan prasarana yang telah menerima bantuan penangkapan yang dimonitoring pemanafaatannya adalah kelompok penangkapan ikan yang memiliki alasan pemilihan : Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimonitoring pemanafaatannya adalah kelompok penangkapan penerima sarana dan prasarana yang telah menerima bantuan penangkapan yang diterima dan prasarana penangkapan pada tahun yang bersangkutan.	(4)	Makna indikator : - Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria yaitu kelompok yang sudah berbadan hukum dan ditetapkan sebagai kelompok penerima sarana dan prasarana penangkapan melalui surat keputusan Bupati pada tahun bersangkutan.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap
	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)		(5)	Bidang Perikanan Tangkap	
	PENANGGUNG JAWAB		(6)	Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap	

			- Jumlah kelompok penerima sarpras yang dimonitoring pemanfaatannya adalah jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana penangkapan pada tahun sebelumnya.		
--	--	--	---	--	--

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap

MUGAYATSYAH, S.PI
NIP.19751227 200501 1 011

**INDIKATOR KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

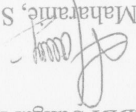
Jabatan	:	Kepala Balai Benih Ikan (BBI) Sungai Kambat
Tugas	:	Memimpin Unit Pelayanan Teknis Daerah kegiatan Pembenhahan ikan dari pengelolaan calon induk, induk sampai menjadi benih ikan berdasarkan Petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan dinas, kegiatan pembinaan Unit Pembenhahan Rakyat (UPR) secara berkala, Peningkatan kompetensi kinerja petugas pembenhahan ikan.
Fungsi	:	Sebagai pengambil kebijaksanaan hadap rencana dan program kerjaber dasarkan hasil analisis data dan informasi yang di peroleh dari kegiatan Pengelolaan benih ikan, pembinaan UPR dan Peningkatan kemampuan tugas pembenhahan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna indikator, Alasan Pemilihan Cara perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Pengelolaan Benih Ikan	Jumlah produksi benih ikan unggul yang tersedia untuk masyarakat	Komoditas yang menghasilkan benih ikan di BBI Sungai Kambat yaitu Patin, Nila, Lele, Gurame dan betok/Papuyu. Proses awal untuk menghasi ikan benih ikan di BBI Sungai Kambat, yaitu : 1. Pemeliharaan calon induk ikan sampai menjadi induk ikan yang matang gonad/kelamin 2. Seleksi Induk ikan yang matang gonad untuk dipijahkan/ dikawinkan 3. Pemijahan/kawin ikan dilakukan secara alami, semi buatan dan buatan tergantung dari jenis ikan 4. Ikan yang merijah menghasilkan telur ikan kemudian menetas menjadi larva ikan 5. Benih-benih ikan yang dihasilkan dari komoditas yang ada merupakan benih ikan yang ditargetkan di BBI Sungai Kambat 6. Benih-benih ikan yang dihasilkan selanjutnya distribusikan/dijual kepembudidaya ikan. 7. Hasi penjualan benih ikan menjadi data untuk produksi benih di BBI Sungai Kambat.	Kepala BBI Sungai Kambat	Data Pembenhahan ikan yaitu benih ikan yang terjual. Data Unit Pembenhahan Rakyat (UPR) Binaan di Kabupaten Barito Kuala
			Salah satu Indikator keberhasilan Balai Benih Ikan (BBI) dengan adanya Unit Pembenhahan Rakyat (UPR). Secara berkala dilakukan monitoring tiga bulan sekali ke UPR yang ada di Kabupaten Barito Kuala dengan wawancara untuk transfer teknologi perbenhahan ikan dan pengisian data produksi perbenhahan ikan.		

	Jumlah petugas teknis perbenihan yang meningkatkan kemampuannya		
Dalam Upaya membangun kemandirian dan ketangguhan perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan, maka perlu meningkatkan sumber dayamannusia petugas di BBI Sungai Kambat dengan cara mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan dan Kementerian Kelautan Perikanan. Berkunjung/study banding langsung ketempat Pembenhinan ikan yang sudah berhasil dalam penerapan Cara Pembenhinan ikan yang baik (CPIB) dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman tentang teknik reproduksi ikan, meningkatkan reproduktivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), efisiensi teknologi, pengembangan kerjasama dan penguasaan pasar produk perikanan budidaya sekaligus dalam upaya sinkronisasi perbenihan ikan dari hilir keulu untuk mendapatkan benih ikan bermutu			
	Kepala BBI Sungai Kambat		
Data Pelaksanaan/ Petugas di BBI Sungai Kambat yang mengikuti kegiatan workshop dam study banding.			

Marabahan, Januari 2020

Kepala BBI Sungai Kambat



Novya Maharamie, S.Pi., M.Si

NIP. 19791121 200803 2 002